

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kanwil Kemenkumham RI) adalah instansi vertikal yang berkedudukan di setiap provinsi dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di Sulawesi utara dikenal sebagai kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Ham Sulawesi Utara.

Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset, dan kas yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Proses pencatatan tersebut dilakukan oleh pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah atau PPK-SKPD dan pada akhir periode dari catatan tersebut PPK-SKPD menyusun laporan keuangan untuk satuan kerja bersangkutan.

Sebagai instansi pemerintahan, Kantor Wilayah Hukum Dan Ham Sulawesi Utara juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan hasil laporan keuangannya, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan.

Basis akrual adalah basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.

Dalam konteks daerah, pengakuan dan pencatatan transaksi akuntansi pada basis akrual adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan diakui/dicatat pada saat timbulnya hak dan tidak semata-mata pada saat kas masuk ke kas daerah
2. Belanja diakui/dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau tidak selalu pada saat kas keluar dari kas daerah

3. Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal.
4. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Manfaat dari akuntansi berbasis akrual adalah:

- a. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah daerah
- b. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah
- c. Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah lebih baik Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan.

Dalam penyusunan laporan keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham dipengaruhi oleh Sistem Aplikasi Satuan Kerja. Sistem Aplikasi Satuan Kerja adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat surat perintah membayar dan juga beberapa fungsi terpadu lainnya. Sistem Aplikasi Satuan Kerja dibuat oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan atau DSP Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Yang secara resmi dirilis di situs resmi Ditjen Perbendaharaan.

Ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi hasil dari Sistem Aplikasi Satuan Kerja antara lain Kesiapan operator yang mengoperasikan Sistem Aplikasi Satuan Kerja, perangkat yang Digunakan, kelengkapan dan kebenaran dokumen, namun dalam pengoperasian sistem aplikasi satuan kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Utara peneliti melihat beberapa masalah yaitu error ketika pembuatan laporan pertanggungjawaban, kesalahan dalam menginput, dan kekurangan tenaga kerja yang dapat mengoperasikan Sistem Aplikasi Satuan Kerja ini. Dari latar belakang diatas maka peneliti mengangkat judul **“Evaluasi penerapan Sistem Aplikasi Satuan Kerja (SAS) dalam mendukung laporan keuangan di KEMENKUMHAM”**.

1.2 Batasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini pada lingkup penerapan Sistem Aplikasi Satuan Kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAMSulawesi Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Apakah penerapan Sistem Aplikasi Satuan Kerja pada Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Utara telah efektif dan efisien dalam mendukung pembuatan laporan keuangan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengevaluasi penerapan Sistem Aplikasi Satuan Kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Utara apakah telah efektif dan efisien dalam mendukung pembuatan laporan keuangan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan bahan evaluasi untuk kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Utara.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi peneliti baru yang akan datang, serta dapat dijadikan pembandingan untuk teori satu dan teori yang lain.
3. Hasil penelitian ini dapat menambah dan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama proses perkuliahan